

Forum Freedom 5, 20 Juni 2005

Tema: Ekonomi Pasar

Nara sumber : M. Chatib Basri

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom..

Hamid Basyaib (HB) : Selamat pagi saudara, kita jumpa lagi dalam Forum Freedom, kerjasama Freedom Institute dan Radio 68h. Pagi ini saya kedatangan tamu Dr. M. Chatib Basri. Saya biasa memanggilnya Dede. Kita rileks aja...

Kita mau ngomong soal ekonomi liberal. Kita mau ngomong dari yang paling umum sekali. Saya mau ngasih pengantar sedikit: ekonomi liberal atau segala sesuatu yang berhubungan dengan liberalisme di Indonesia itu istilahnya notorious, terkenal buruknya. Kalau Anda tanya aktifis atau tanya para pakar, pasti mereka lebih mungkin untuk tidak setuju daripada setuju. Kalau kita lihat, misalnya di zaman Orde Lama, bahkan Bung Karno sendiri membuat istilah baru yang enggak pernah ada di literatur ekonomi, yang dia kecam adalah ekonomi free faith liberalism. Jadi liberal itu sesuatu yang buruk, dianggap tidak memihak rakyat, tidak pro terhadap kepentingan kaum lemah, dan sebaliknya dia lebih memihak pada golongan kaya, bisnis besar, dsb. Anda, kita kenal sebagai ekonom yang mengusung liberalisme atau yang percaya pada liberalisme. Anda sebagai ekonom Indonesia yang terang terangan bikin preferensi atau lebih suka pada ekonomi liberal daripada yang lain. De, bisa dijelaskan kenapa Anda memilih itu dan apa dasar-dasar ekonomi liberal itu?

M. Chatib Basri (MCB): Ok, esensi utama kenapa saya menganggap bahwa ekonomi di mana peran pemerintah relatif terbatas bisa memberi banyak manfaat kepada banyak orang itu sebetulnya karena begini: di dalam proses kebijakan ekonomi seringkali bahwa kepentingan individu, kepentingan rakyat itu selalu diatasnamakan oleh negara. Tetapi persoalannya adalah siapa yang bisa mendefinisikan bahwa kepentingan rakyat itu sama dengan kepentingan negara. Karena, kalau kita bicara dari basis individu, tiap individu itu akan punya preferensi; kalau kita bicara mengenai satu kepentingan umum, maka harus ada satu representasi di dalam masyarakat, dan itu hanya bisa di dalam satu sistem totaliter. Kalau enggak, enggak akan ada orang yang bisa mengatasnamakan dirinya mewakili rakyat, karena mereka representasi yang sebetulnya tidak jelas. Saya ambil satu contoh. Ini ada satu quotes yang bagus sekali dari Adam Smith yang bilang, "Kalau orang itu mementingkan dirinya sendiri, maka secara tidak langsung dia akan membawa kepentingan publik". Misalnya, kalau Anda di sekolah belajar sebaik-baiknya, orang lain belajar sebaik-baiknya untuk kepentingan diri sendiri, maka kelas itu akan jadi bermutu. Karena tiap orang akan berkompetisi.

Tapi kemudian ada seorang ekonom yang bernama Milton Friedman yang sedikit memodifikasinya, bilang, "Tapi yang terjadi sebaliknya, kalau orang selalu bicara mengenai kepentingan umum, maka secara tidak langsung dia sebetulnya berbicara mengenai kepentingan pribadi". Nah, itu seringkali dimunculkan didalam bentuk misalnya: kita harus melindungi kelompok tertentu, ekonomi pribumi melawan ekonomi Cina. Ketika kita melakukan justifikasi seperti itu, maka sebetulnya yang diuntungkan belum tentu (pribumi). Kalau kita bicara mengenai kemiskinan, kemiskinan itu enggak kenal pri dan non-pri, orang miskin itu enggak kenal ras, dia bisa pri maupun non-pri. Yang terjadi adalah ketika kita bicara untuk satu kelompok kepentingan ekonomi tertentu,

maka interest ekonomi dari kelompok itulah yang selalu berusaha dimenangkan. Saya melihat bahwa banyak problema yang muncul di sini selama ini adalah karena praktis pasar di Indonesia itu enggak bisa jalan. Jadi kalau orang bicara mengenai Indonesia yang sangat liberal, dalam ukuran apa? Aset yang paling banyak itu di tangan BUMN. Kalau Anda bicara mengenai regulasi pemerintah, pemerintah pun masuk dalam transaksi sosial ekonomi.

HB: Jadi sebetulnya ekonomi kita sama sekali masih jauh dari liberal?

MCB: Saya melihatnya masih jauh.

HB: Dan yang Anda inginkan justru semakin liberal?

MCB: Betul. Karena kalau kita lihat, kita baru mulai melakukan tahap itu pertengahan 1980-an, dan itu pun masih pada tahap yang awal. Tadi Anda bicara mengenai jaman dulu kenapa kemudian pengertian liberalisme itu menjadi pejoratif. Itu karena, kita juga harus lihat dari struktur sejarah pada waktu itu ketika Indonesia merdeka. Founding fathers kita itu semuanya dididik di dalam suasana sosialisme yang amat kental. Dan Belanda selalu diidentikkan dengan imperialisme, itu barat, dan itu adalah kapitalisme. Jadi simbol-simbol seperti ini yang selalu digunakan. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat lagi sejarah, bahkan Bung Hatta ketika bicara mengenai UUD 45 sudah mulai bicara mengenai hak-hak individu itu dijamin.

HB: Tapi masalahnya dia menjamin itu dalam konteks politik, begitu ngomong ekonomi kan koperasi, sosialistik?

MCB: Persis. Sebetulnya idenya sama mengenai basis individu. Karena kemerdekaan ekonomi itu akan menghasilkan satu kemerdekaan politik. Saya ambil contoh begini: kalau misalnya Anda enggak suka sama si x atau Anda enggak suka dengan komunis, maka yang Anda lakukan adalah Anda enggak mau membeli produk dari negara-negara komunis. Apa yang terjadi? Anda kehilangan kesempatan pilihan. Karena Anda enggak mau ambil barang dari negara komunis. Akibatnya, pasar akan menghukum Anda dengan kehilangan kesempatan untuk memilih barang, sehingga harga barang menjadi lebih mahal.

HB: Otomatis ya?

MCB: Dengan sendirinya. Karena kita mengatakan bahwa kita enggak mau beli barang dari negara komunis. Hebatnya di dalam sistem pasar adalah ketika Anda makan roti atau nasi, kita enggak pernah berpikir apakah roti itu gandumnya atau beras itu ditumbuk oleh seorang fasis atau ditumbuk oleh seorang komunis, fundamentalis, Yahudi dst. Anda enggak berpikir mengenai itu. Pasar kemudian membuat semuanya menjadi tidak relevan. Ketika Anda bilang, "Oh, saya tidak suka dengan orang komunis, maka saya enggak mau beli". Maka Anda kemudian menghilangkan kesempatan. Dengan sendirinya pasar akan melakukan hukuman melalui kenaikan harga.

HB: Mengapa ketidaksukaan pada liberalisme atau semua yang berbau liberal juga menghinggapi para akademisi? Jadi kalau di UGM itu ada almarhum Prof. Mubyarto yang betul-betul gigih melawan liberalisme. Tapi di luar UGM, secara umum di LSM-LSM juga semangatnya anti-liberal. Kenapa bisa begitu?

MCB: Saya kira ini juga kembali lagi pada tradisi pemikiran. Karena kalau kita lihat gerakan, entah itu gerakan mahasiswa atau segala sesuatu yang Anda sebut kerakyatan, kalau Pak Mubyarto selalu diidentikkan dengan ekonomi rakyat, ekonomi pancasila, selalu bentuknya adalah kolejal, di mana

individualistik itu adalah sesuatu yang kotor dst. Cara pemikiran ini juga sebetulnya harus kita lihat dari tradisi sejarah. Karena ketika kita lihat perubahan-perubahan di berbagai negara, salah satu ide pemikiran perubahan yang revolusioner kan selalu datang dari kalangan kiri. Sehingga ada joke: kalau Anda di bawah 30 tahun enggak kiri, Anda enggak punya hati. Jadi saya kira ini memengaruhi semua pemikiran, tapi ini enggak bisa menjelaskan semuanya. Seperti di Prancis, misalnya orang seperti Bernard Henry Levy yang berubah dari kiri ke kanan, itu juga muncul dengan pemikiran-pemikiran yang radikal.

Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, sebetulnya saya kok melihat bahwa di dalam banyak hal, pemikiran-pemikiran yang justru basisnya adalah pemikiran pasar, itu sangat membantu masyarakat. Saya ambil contoh begini: saya ini kan ngajar di FEUI. 90% mahasiswa saya dari Jakarta. Karena kalau orang dari FEUI requirementnya banyak, harus tes bahasa Inggris, harus bimbingan macam-macam, dsb. Tapi ada kesadaran bahwa pendidikan itu harus disubsidi oleh pemerintah. 90% mahasiswa saya dari Jakarta, yang notabene tidak perlu disubsidi karena kaya-kaya. Kalau saya mau ngajar, saya susah parkir, karena mereka datang dengan BMW, mercy dsb. Pertanyaannya: apakah fair kalau mereka dapat subsidi? Kalau kita kembali lagi pada pemikiran pasar, mestinya bilang: "Dilepasin aja harganya, jangan kemudian disubsidi. Kenapa orang kaya mesti disubsidi". Seperti itu yang terjadi. Walaupun saya enggak menutup mata, misalnya ada temen-temen dari daerah yang bersekolah (dengan tidak memiliki modal banyak). Nah, itu polanya seperti di mana pun, bahkan di negara yang dianggap kapitalistik seperti di Amerika, itu ada namanya program beasiswa. Itu yang bisa dilakukan. Tapi kalau memberikan subsidi, misalnya untuk FEUI, saya kok enggak melihat manfaatnya. Kenapa orang kaya harus dibantu terus menerus.

HB: Jangan-jangan dari daerah pun anak gubernur, anak bupati, atau anak orang-orang kaya di daerah?

MCB: Ini yang saya bilang justru banyak sekali anomali yang terjadi. Begitu juga dengan beras. Orang selalu bilang bahwa beras itu harus diprotek, karena kasihan petaninya. Tapi sebelum itu, saya melenceng dulu karena ini agak lucu ya, kalau beras itu enggak apa-apa harganya mahal, karena melindungi petani. Tapi kalau BBM enggak boleh mahal, padahal orang itu lebih penting makan beras ketimbang konsumsi BBM. Tetapi kalau bicara beras harganya harus dinaikkan. Nah, yang menarik adalah kalau kita lihat karakteristik dari mereka yang miskin. Itu (orang miskin) bekerjanya sebagai petani dan bukan pemilik tanah. Buruh tani dan dia dapat gaji. Jadi kalau harga beras mahal, dia harus beli beras dengan harga yang relatif mahal.

HB: Tetap masalah ya, berarti yang diuntungkan hanya segelintir petani pemilik tanah ya?

MCB: Ya, persis. Nah itu yang saya bilang, kadang-kadang pemikiran pasar itu berbeda dengan pikiran banyak orang, yang seolah-olah dianggap tidak pro kepada yang miskin itu enggak sepenuhnya benar.

HB: Anda baru saja berilustrasi tentang petani, subsidi kepada petani yang sebenarnya salah sasaran. Tapi apakah Anda punya data bahwa sebagian besar yang bergerak di bidang pertanian itu adalah buruh tani, bukan petani pemilik tanah. Sehingga kalau disubsidi sebetulnya yang diuntungkan hanya segelintir kecil petani, sementara buruh taninya tetap tercekik. Kalau beras mahal, dia tetap beli, walaupun dia yang nanem?

MCB: Ada datanya, sayang saya enggak bawa. Tapi saya bisa bilang bahwa 66% dari penduduk Indonesia adalah konsumen beras dan bukan produsen. Jadi kalau beras mahal, yang dirugikan selalu konsumen.

HB: Kalau begitu kenapa orang bisa membela sesuatu yang keliru. Itu kan artinya dia membela sesuatu yang keliru atau kira-kira dalam rumusan lain *defending undefendable*. Padahal mereka kan akademisi, ahli ekonomi, dsb, tapi kok bisa meleset, apakah mereka enggak lihat data?

MCB: Mungkin agak sulit untuk menyimpulkan mengenai kenapa orang punya pendapat seperti itu. Bisa juga karena alasan ideologis. Tapi yang banyak terjadi adalah bahwa ketika kita berhadapan dengan data, ternyata kadang-kadang hal yang seperti kita bayangkan itu enggak terjadi. Tadi saya bicara tentang petani misalnya, 66% dari kita itu adalah konsumen beras. Jadi kalau misalnya berasnya mahal, maka konsumennya dirugikan. Produsennya itu relatif kecil sekali. Karena kalau Anda bicara mengenai petani gurem tadi, mereka juga makan beras dan harus beli. Dan mereka itu enggak hanya produksi beras. Jadi kita juga harus lihat ini dengan hati-hati.

Saya mau kasih contoh yang lain, bagaimana ekonomi yang disebut *pro pasar* itu sebetulnya sangat menolong kita. Seandainya pasar tenaga kerja ini bebas, saya tanya sama Anda Bung Hamid, Anda bisa bayangin enggak kalau di Indonesia yang ngerjain konstruksi bangunan orang Singapura? Susah buat saya untuk bayangin.

HB: Dalam arti apa?

MCB: Pekerja bangunan itu orang Singapura atau orang Amerika. Tapi kita bisa membayangkan bahwa yang mengerjakan bangunan, konstruksi, entah itu di Malaysia atau di mana-mana itu orang Indonesia.

HB: Mudah membayangkan.

MCB: Tapi Anda susah membayangkan kalau yang mengerjakan semua itu orang Malaysia. Artinya kalau kita *pro* kepada yang menengah bawah, tenaga kerja yang unskill tadi, kalau kita lakukan pasar tenaga kerjanya bebas, pasar kita di domestik itu enggak mungkin direbut oleh Malaysia. Karena mereka enggak mungkin kerja di sini sebagai kuli bangunan, sementara pasar tenaga kerja di Malaysia untuk kuli bangunan itu bisa kita ambil. Jadi sebenarnya yang diuntungkan kalau tenaga kerjanya dibuka luas itu adalah yang menengah bawah, yang rugi itu adalah ekonom, akuntan, jurnalis, dst. Tapi kita selalu bicara untuk melindungi yang miskin, pasar tenaga kerja kita protek. Sebelumnya kita bicara, untuk melindungi diri kita sendiri, maka kemudian pasar tenaga kerja kita protek. Itu yang terjadi. Begitu juga dengan beberapa kasus lain. Saya ambil contoh otomotif. Dari dulu diproteksi, sekarang penurunannya banyak. Alasannya karena otomotif itu kalau dibiarin kompetisi dari luar, itu enggak akan siap. Anak bayi itu masih menyusui.

HB: Artinya, merek-merek yang diimpor dibatasi?

MCB: Bukan itu aja, tapi tarif impornya juga tinggi. Bahkan dilarang masuk dulu karena industri otomotif kita dianggap bayi.

HB: Industri otomotif kita kan cuma assembling, merakit aja kan, bukan memproduksi murni?

MCB: Sekarang udah mulai. Jadi waktu itu assembling, bahwa itu enggak boleh

masuk. Nah alasannya adalah kalau bayi itu mesti dilindungi. Argumen ini bagus. Pertanyaannya adalah begini: kalau bayi itu ada batas waktu menjadi bayi. Tapi kalau 25 tahun, dari tahun 70-95, bayinya dilindungi terus, itu pornografi. Karena kalau orang berumur 25 tahun masih menyusui, itu pornografi. Itu bukan bayi lagi. Itu yang saya bilang bahwa hal-hal seperti ini, mesti kita tempatkan pada posisi yang benar.

Dan Anda tadi bicara mengenai bisnis besar, apakah betul bahwa ekonomi liberal hanya pro kepada bisnis besar? Enggak. Karena bisnis besar yang hidup dari proteksi pemerintah itu tidak pernah suka dengan ekonomi liberal, karena ekonomi liberal selalu mengandaikan adanya persaingan. Sedangkan bisnis besar itu pengennya selalu monopoli, kalau bisa selalu dilindungi. Itu yang menyebabkan, kalau kita melihat sejarah di Indonesia, semua bisnis besar di sini itu tumbuhnya karena proteksi yang diberikan pemerintah. Sesuatu yang amat diharamkan dalam pemikiran ekonomi pasar.

HB: Banyak orang mulai mengaitkan, misalnya meledaknya kasus busung lapar yang sangat mengganggu nurani kita di negeri yang kaya raya ini dan sudah 60 tahun merdeka, dengan ekonomi liberal. Inilah kalau liberal, ada cukup banyak sektor masyarakat kecil yang semakin tertinggal. Jadi argumen mereka, yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya. Itulah rumusan populer tentang bahayanya ekonomi liberal. Bagaimana Anda melihat kasus-kasus seperti itu?

MCB: Sebetulnya begini. Ini ada satu perdebatan yang sampai sekarang enggak pernah selesai. Isu yang paling besar di dalam kemiskinan itu adalah soal akses.

HB: Akses terhadap modal?

MCB: Kalau tadi bicara mengenai soal busung lapar itu (aksesnya) adalah kesehatan, pendidikan. Di dalam pemikiran ekonomi liberal yang paling penting adalah setiap orang itu punya akses yang sama. Kalau Anda bicara akses yang sama, right yang sama. Karena kalau kita bicara mengenai kebebasan individu, semua orang itu haknya mesti sama. Anda bebas, enggak ada privilege kepada kelompok tertentu. Kalau Anda punya hak yang sama, maka Anda enggak bisa menentukan outcomenya, hasilnya. Kalau Anda bikin equality di dalam right, Anda enggak bisa dapat equality di dalam outcome. Di negara-negara sosialis, outcomenya yang Anda bikin equal, semua orang itu harus sama rata sama rasa. Akibatnya, right atau haknya enggak bisa Anda bikin equal.

HB: Pasti?

MCB: Pasti, itu hukumnya begitu. Di dalam pemikiran ekonomi liberal sebetulnya yang paling penting adalah (misalnya dalam kasus busung lapar tadi): apakah penduduk-penduduk di daerah itu punya akses-akses yang sama?

HB: Fasilitas kesehatan?

MCB: Persis.

HB: Kalau ternyata tidak, itu memang salah ya?

MCB: Di situ persoalannya..

HB: Lepas dari sistem liberal atau apa, itu jelas salah kalau enggak ada

akses?

MCB: Itu yang harus dijamin sebetulnya. Bahkan di dalam pemikiran, walaupun dianggap strukturalis, orang seperti Amartya Sen misalnya selalu bilang bahwa pada dasarnya dia mencoba menggabungkan antara John Rawls dan Robert Nozick dan dua-duanya itu dianggap sebagai tokoh dalam pemikiran liberal. Dia coba gabungkan diantara keduanya. Dia juga menunjukkan betapa pentingnya akses, karena itu Sen selalu bicara mengenai kebebasan. Esensi dari semuanya adalah kebebasan. Karena kebebasan memungkinkan orang untuk memelihara akses. Dan kalau Anda berbicara mengenai ekonomi liberal, dasarnya itu adalah freedom. Kalau A sudah mulai intervensi di mana-mana, Anda enggak punya lagi freedom.

Saya kasih contoh paling gampang adalah BPPC waktu dulu. Waktu itu orang harus jual cengkehnya ke BPPC dan harus beli dari BPPC. Aksesnya itu tertutup. Itu yang di bilang oleh Sen, entitlementnya hilang. Dan itu dilakukan oleh Negara. Satu sistem ekonomi di Negara yang katanya pancasila menjadi seratus persen sosialis. Bahkan di Soviet saja enggak terjadi.

HB: Seratus persen sosialis, tetapi yang diuntungkan bukan negara?

MCB: Kelompok bisnis. Orang-orang yang kebetulan berada di lingkaran nama besar Soeharto.

HB: Jadi aksesnya yang penting. Kalau ternyata orang bilang aksesnya itu tidak diberi sama, misalnya ada orang desa yang jauh, yang memang enggak punya akses. Nah, apakah itu bisa dipersalahkan pada idenya atau pelaksanaannya?

MCB: Sebetulnya lebih pada soal pelaksanaan. Karena begini, liberalisme adalah selalu sibuk dengan prosedur. Jadi dia harus menjamin bahwa hak orang itu harus ada, harus sama. Itu prosedur yang harus dipenuhi. Kalau Anda enggak penuhi itu, maka ekonomi liberal enggak pernah bisa jalan. Makanya dia bicara mengenai property right. Dia selalu bicara mengenai prosedur, equality di dalam right. Tapi dia enggak akan bicara equality di dalam outcome.

Saya ingat, saya pernah ketemu dengan Allan Walters, penasihat ekonomi Margaret Thatcher yang mengusung pemikiran liberal, thatcherisme. Saya tanya sama Mr. Allan waktu itu: kalau Anda ketemu dengan orang yang penghasilannya 10 juta, di sisi lain ada orang lain yang penghasilannya 1 juta. Apa yang Anda lakukan? Kan mestinya Anda pajak yang 10 juta supaya dikasih ke yang 1 juta. Supaya rata. Tapi jawaban dia bener-bener mengejutkan. Dia bilang begini: kenapa Anda berpikir yang sepuluh itu mesti diambil uangnya, kenapa enggak berpikir yang satu dibikin akses supaya sepuluh. Ini cara melihat persoalan. Ini yang tadi saya bilang bahwa soalnya adalah pada akses. Jadi ketika Anda bicara, kita naik bus dan orang lain naik mercy, persoalannya adalah bukan pada soal dia punya mercy dan kita naik bus, tapi apakah kita punya akses untuk bisa punya mercy.

HB: Ada asumsi atau hasrat tersembunyi dari mereka yang mempromosikan ekonomi illiberal atau non-liberal yaitu persis yang dibilang Allan Walters itu. Mereka kelihatannya ingin (bilang) daripada ada ketimpangan lebih baik semua susah. Saya terus terang menangkapnya begitu?

MCB: Sebetulnya pertanyaannya adalah begini: bagaimana kita mendefinisikan adil. Adil itu equal atau proper. Yang namanya adil itu yang sesuai atau

yang sama. Kalau Anda berbicara mengenai sama, itu berarti semua orang harus sama. Begini, orang yang enggak kerja, dia harus dapat upah gak? Kalau Anda bicara equal, berarti dia harus dapat. Tapi kalau Anda bicara mengenai proper, kalau dia enggak kerja, dia enggak dapat upah.

HB: Atau kalau kerjanya kecil, upahnya kecil juga?

MCB: Persis. Nah, ketika Anda bicara mengenai keadilan, gimana kita mendefinisikan? Di dalam sistem ekonomi yang lebih menyerahkan diri pada pasar, Anda enggak bicara mengenai equal, Anda bicara mengenai proper. Kalau Anda kerja keras, Anda akan dapat return yang besar; kalau Anda enggak kerja, Anda enggak dapat apa-apa. Di situ unsur keadilan justru dilihat ketimbang Anda kerja dan enggak kerja tapi Anda dapat sama. Apakah itu sesuatu yang adil? Sesuatu yang fair? Ini selalu menjadi bahan perdebatan.

HB: Anda sendiri belum memilih mana yang persis?

MCB: Kalau saya melihat bahwa yang namanya adil itu proper. Kalau orang kerja keras, ya dia mesti dikasih balas jasa yang sama. Ketika orang enggak kerja apa-apa, lalu Anda kasih balas jasa yang tinggi, maka itu akan membuat orang untuk tidak bekerja.

HB: Baik, waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran Anda. Saudara sekalian, demikian forum freedom pagi ini. Kita berjumpa minggu depan. Saya Hamid Basyaib, Wasallam.

Tanggapan:

081370637434 : P' nara sumber, saya Cuma bisa bilang masih dijajah belanda melalui ekonomi, pendidikan dan politik. Dan tolong jelaskan asal mula kata indonesia & siapa yang menciptakan UUD dan pancasila? Dan apa bapak sudah merasa merdeka? Ttd, Wen Gerpa Dali Munte. Comando Deli Merdeka

081370637434 : Kalau memang Indonesia memakai hukum demokrasi, coba kembalikan ASNLF kepada bangsa Aceh itu sendiri. Apa arti pemberontak? Apa mengusir penjajah itu negaranya lagi dijajah? Balas!